

Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Vfm (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil)

Dewi Puspita Sari, Dewi Sartika²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 11 Juli 2024
Revised: 24 Juli 2024
Accepted: 31 Juli 2024

KEYWORDS

Performance, Value for money, Economy, Efficiency, Effectiveness

CORRESPONDENCE

E-mail: dewisartikautu@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the performance of the Aceh Singkil Regency Financial Management Agency from 2020 to 2022 using the value-for-money concept, which includes economy, efficiency, and effectiveness. By examining financial statements, specifically the Budget Realization Report (LRA) and Government Agency Performance Report (LAKIP), and employing time series data, this quantitative research reveals that the agency achieved a very good rating. The economic ratio averaged 95.65% (economical), the efficiency ratio 92% (efficient), and the effectiveness ratio 103% (effective), demonstrating that the agency has successfully applied value-for-money principles in budget management. Initially focused on inputs, outputs, and outcomes, the agency has since expanded its approach, achieving strong results in managing its programs and budget effectively.

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntan publik di India dengan cepat mencapai puncaknya berdasarkan kebijakan penerapan otonomi daerah (Sari, 2014) yang dimana akuntan publik di India menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia serta perkembangan teknologi yang telah meningkatkan efisiensi. Menurut UU No. Menurut UU 32 Tahun 2014, otonomi daerah ialah sebuah hak, kekuasaan, serta komitmen daerah agar melaksanakan kekuasaan administratif dan kepentingan umum selaras dengan menurut hukum. Tanggung jawabnya juga mencakup akuntabilitas dan daya tanggap terhadap rencana sektor publik. Karenanya, diperlukan ukuran kinerja dalam mengevaluasi akuntabilitas manajemen demi memberikan layanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada tujuan. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi kemajuan kinerja akan tujuan dan target yang telah ditetapkan berupa informasi implementasi sumber daya dengan baik dalam pembuatan barang atau jasa (Zubair, 2016). Kualitas barang dan jasa (yang diserahkan pada pelanggan dengan tingkat yang membuat mereka puas). Menurut Mahmudi (2015), value for money adalah proses operasional yang mengelola dan mengendalikan keekonomian, efisiensi dan efektivitas dalam operasi, proyek dan kelompok. Evaluasi kinerja berlandaskan konsep value for money ialah bentuk penilaian kinerja khusus yang sulit digunakan di sektor publik. Teori value for money menjadi tolak ukur mengenai menilai kinerja organisasi sektor publik sebab kinerja pemerintah perlu mengamati input, output serta proses yang tidak bisa dinilai hanya berdasarkan output saja (Naim, 2013).

Mengingat Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai potensi yang besar dalam mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangannya, sehingga BPKK Aceh Singkil selaku lembaga sektor publik yang mengelola keuangan Aceh Singkil, telah menentukan program agar mendukung pengembangan lembaga keuangan. Hal ini didasarkan pada tujuan BPKK Aceh Singkil yaitu mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran berimbang, pengelolaan sumber daya daerah untuk kepentingan umum dan pengetahuan pengelolaan keuangan <https://bpkk.acehsingkilkab.go.id/>, maka diperlukan tindakan evaluasi kinerja agar memahami kinerja seluruhnya. Kegiatan BPKK Aceh Singkil dievaluasi melalui input,

output dan outcome, tiga aspek value for money: yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Menganalisis laporan keuangan BPKK dalam format LAKIP dan LRA merupakan tujuan dari penelitian ini.

Penelitian pengukuran kinerja perusahaan publik berdasarkan teori value for money telah banyak diusut dengan beragam varian. Menurut Putra (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Polres Ogan Iliri cukup baik akan teori value for money sebab memenuhi dua nilai value for money yaitu ekonomi dan efisiensi, walaupun unsur efektivitas belum efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Irmawati dan Rifka Rinaldy (2018) di wilayah Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya pada periode 2013-2015 menemukan bahwa sektor perekonomian tidak berjalan dengan baik sedangkan rasio efisiensi dan efektivitas memperlihatkan hasil yang memuaskan. Dengan begitu pemerintah sangat memerlukan pengukuran kinerja untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Kajian Riset Indrayani (2018) menemukan bahwa DPAKD di Kota Lhoukseumawe Provinsi Aceh mampu menerapkan value for money sebagai program penilaian kinerja, walaupun pada efektivitas tahun 2014-2016 masih dibawah 100% yang dinilai kurang baik. Penelitian ini memiliki tujuan ialah untuk mengetahui kinerja suatu lembaga pengelola keuangan di Kabupaten Aceh Singkil melalui pengadopsian gagasan *value for money*. Konsep value for money pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan akuntabilitas serta perbaikan kualitas layanan publik.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) ialah evaluasi terhadap perkembangan bisnis menuju target dan tujuan yang telah diputuskan berupa informasi perihal efisiensi dalam menggunakan sumber daya dalam produksi barang atau jasa. (Zubair, 2016). Hasil dari proses mutu barang atau jasa (tingkat barang atau jasa yang diserahkan pada pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan) dibandingkan oleh sasaran yang telah ditetapkan (Mahsun, 2015). Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa, evaluasi kinerja dalam suatu organisasi merupakan aspek penting dalam sistem pengendalian. Tujuan yang ditentukan pada tingkat efisiensi dan efektivitas yang dapat ditentukan dengan mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik. Mahsun, (2013) berpendapat bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu cara untuk menggambarkan sejauh mana suatu organisasi telah mencapai tujuan kerjanya. Istilah “kinerja” sering digunakan untuk menggambarkan keberhasilan atau tingkat pencapaian seseorang atau sekelompok individu. Sedermayanti (2017) berpendapat bahwa indikator kinerja adalah sebuah standar kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan Mardiasmo (2018) yang berpendapat bahwa indikator kinerja adalah penilaian kinerja secara tidak langsung. Dengan evaluasi kinerja, sektor publik dapat menentukan apakah tujuan telah tercapai dan dapat memperbaiki kinerja pada periode berikutnya.

Value For Money

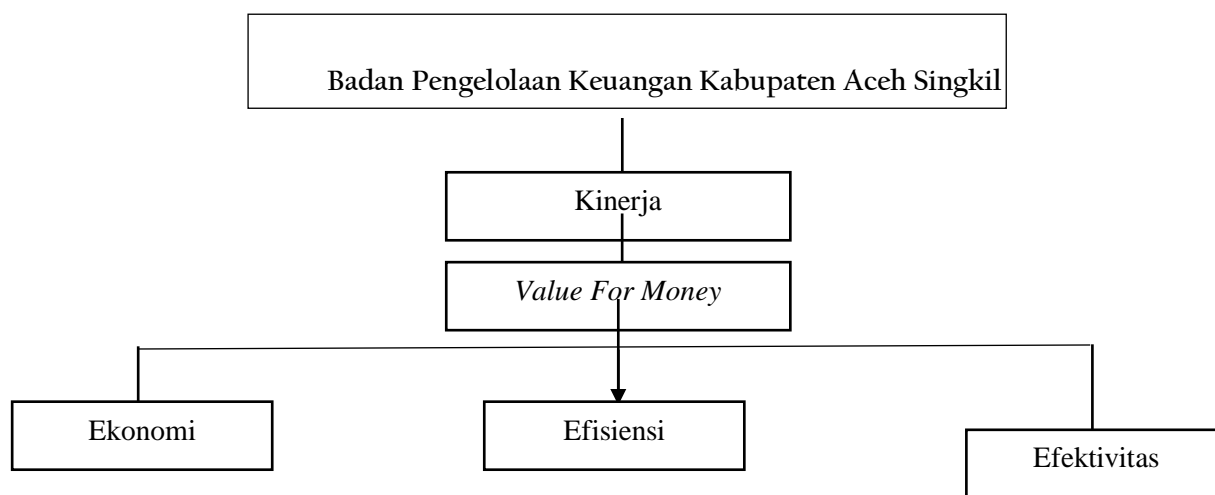
Value for money yaitu tolak ukur yang dapat dipakai dalam menilai kinerja organisasi pemerintah berdasarkan metrik keuangan, efisiensi dan efektivitas (Arisaudi, 2016). Ardila & Putri (2015) menyatakan *value for money* yaitu teori yang dipakai dalam mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik. Mardiasmo (2018), konsep penilaian kinerja berbasis vfm mencakup 3 unsur yaitu:

- Rasio ekonomi hanya memperhitungkan input yang dipakai,
- Rasio efisiensi mengacu pada realisasi keluaran aktual dari suatu masukan atau penerapan input minimum dalam menggapai hasil tertentu. dan
- Rasio efektivitas ialah tidak menunjukkan seberapa pengeluaran biaya untuk mencapai suatu tujuan, namun efisiensi mengukur kesuksesan atau tidak suatu kelompok dalam mencapai tujuan.

Value for money tidak hanya dapat di lihat dari perspektif finansial, tetapi juga dari perspektif non-finansial juga untuk mengevaluasi keberhasilan program kerja sektor publik. Menurut Setyaningrum (2017), konsep pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik harus didasari pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pertama, prinsip ekonomi mencerminkan keterkaitan antara harga pasar dan masukan. Ekonomi dalam konteks ini berarti praktik membeli barang dan jasa input dengan kualitas tertentu secara optimal. Kedua, efisiensi berkaitan dengan produktivitas dalam penggunaan sumber daya, yaitu

meminimalkan penggunaan sumber daya untuk memaksimalkan hasil. Terakhir, efektivitas adalah ukuran sejauh mana target dapat dicapai, baik dari segi kuantitas maupun waktu. Pengukuran kinerja sangat penting dalam value for money agar dapat mengevaluasi kinerja sektor publik dengan baik dan tepat sasaran. Oleh sebab itu Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil sangat memerlukan konsep value for money sebagai konsep pengukuran kinerja agar dapat melihat perkembangan kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dari tahun ke tahun menggunakan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Menurut Sugiyono (2017), kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah organisasi sektor publik yang membidangi masalah keuangan di Kabupaten Aceh Singkil, juga memerlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam menjalankan program kerjanya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep value for money dengan indikator input, output dan outcome dalam pengukuran kinerja sehingga dapat diketahui tingkat kinerja ditinjau dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Kerangka penelitian ini menunjukkan fokus penelitian yaitu pendekatan konseptual menelaah penilaian kinerja menurut konsep value for money (studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil). Untuk memudahkan refleksi terhadap topik yang dibahas, berikut kerangka deskriptif pemikiran peneliti:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan dan menjawab permasalahan penelitian (Malhotr, 2017). Suliyanto (2018) menjelaskan desain penelitian sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara deskriptif kuantitatif. Di dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini digunakan satu jenis variabel, yaitu variabel dependennya (terikat) adalah Konsep Value For Money (Y). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa LRA dan LAKIP menggunakan skala rasio. Desain penelitiannya meliputi:

- a) Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggunakan rasio, dimana variabel dependen (terikat) Value For Money (Y).
- b) Jenis survei Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data sekunder yakni berupa dokumentasi
- c) Setting penelitian Penelitian ini menggunakan konsep value for money
- d) Tingkat keterlibatan penelitian Keterlibatan penelitian disini yaitu peneliti selaku instrumen penting pengumpul data yang bisa dihubungkan langsung dengan instrumen maupun pokok riset, maka peneliti menganalisis tingkat rasio dengan menggunakan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020-2022.

- e) Unit analisis Individu, pasangan, kelompok, organisasi, dan budaya semuanya dapat dianggap sebagai unit analisis. Tingkat unit data yang dikumpulkan pada tahap analisis data berikutnya disebut sebagai analisis unit. (Azwar, 2017). Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil berperan sebagai unit data penelitian.
- f) Horizon waktu Peneliti menggunakan horizon waktu time series di mana penelitian ini dilakukan selama 3 periode mulai Tahun 2020-2022.

Populasi adalah istilah luas yang merujuk pada objek atau subjek yang peneliti pilih untuk dipelajari agar menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini memiliki populasi berupa Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Sampel ialah gambaran dari besarnya dan kriteria yang membentuk populasi (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini, peneliti mengadakan analisa terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan Laporan Realisasi Pemerintah (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2020-2022. Pengumpulan data merupakan tahapan sangat penting dalam penelitian ini dalam memperoleh informasi. Perolehan data penelitian menggunakan teknik studi dokumentasi. Analisa data menggunakan cara analisis deskriptif kuantitatif ialah penjabaran yang berdasarkan perhitungan dalam menentukan tingkat rasio.

1) Rasio Ekonomi

$$Ekonomi = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran biaya untuk memperoleh pendapatan}} \times \%100$$

Tabel 1. Hasil Klasifikasi Pengukuran Ekonomi

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80% -90%	Cukup Ekonomis
60% -80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

2) Rasio Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat efisien
90%-100%	Efisien
80% -90%	Cukup efisien
60% -80%	Kurang efisien
Kurang dari 60%	Tidak efisien

3) Rasio Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3. Hasil Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80% -90%	Cukup Efektif
60% -80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mendagri No.600.900-327 Tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dengan metode value for money dalam penelitian ini, diukur dengan menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas sebagai berikut:

Analisis Rasio Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya sebaiknya dengan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar (Mardiasmo 2018). Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai output yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga input yang sesungguhnya.

Tabel 4. Rasio Ekonomi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomi	Kategori
2020	860.472.547.502,00	883.919.511.827,45	97,35%	Ekonomis
2021	889.251.390.193,00	944.936.121.985,00	94,11%	Ekonomis
2022	859.060.920.612,00	899.413.037.975,00	95,51%	Ekonomis

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Yang Telah Diolah

Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana seminimum mungkin. Untuk dapat mengetahui tingkat rasio efisiensi maka data yang diperlukan adalah LAKIP 2020-2022 yang dimana dalam LAKIP BPKK Aceh Singkil memiliki 2 indikator sasaran strategis (SS) yaitu:

- (1) Peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel.
- (2) Peningkatan pendapatan daerah yang sinegritas dan realistis.

Tabel 5. Rasio Efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Tahun	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Output	Input	Rasio Efisiensi	Kategori
2020	1. Peningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi barang daerah	75,00%	80,00%	94%	Efisien
	2. Peningkatkan pendapatan daerah yang sinegritas dan realistis	2. Tingkat efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/potensi PAD)	85,11%	96,00%	89%	Cukup efisien
2021	1. Peningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi barang daerah	82,75%	85,00%	97%	Efisien
	2. Peningkatkan pendapatan daerah yang sinegritas dan realistis	2. Tingkat efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/potensi PAD)	84,23%	97,00%	87%	Cukup efisien
2022	1. Peningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi barang daerah	85%	85%	100%	Efisien
	2. Peningkatkan pendapatan daerah yang sinegritas dan realistis	2. Tingkat efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/potensi PAD)	76,57%	90%	85%	Cukup efisien

Sumber: Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Yang Telah Diolah

Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (outcome) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (output) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Halim & Kusufi 2013). Untuk dapat mengetahui tingkat rasio efektivitas maka data yang diperlukan adalah LAKIP 2020-2022 yang dimana dalam LAKIP BPKK Aceh Singkil memiliki 2 indikator sasaran strategis (SS) yaitu: (1) Peningkatan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel. (2) Peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis.

Tabel 6. Rasio Efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Tahun	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Capaian Kinerja	Target	Rasio Efektivitas	Kategori
2020	1. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan Aplikasi barang daerah	93,75%	80,00%	117%	Sangat efektif
	2. Meningkatkan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis	2. Tingkat efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/potensi PAD)	88,65%	96,00%	92%	Efektif
2021	1. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan Aplikasi barang daerah	97,35%	85,00%	114%	Sangat efektif
	2. Meningkatkan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis	2. Tingkat efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/potensi PAD)	86,83%	97,00%	89%	Cukup Efektif
2022	1. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	1. Tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan Aplikasi barang daerah	100%	85,07%	117%	Sangat efektif
	2. Meningkatkan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis	2. Tingkat efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/potensi PAD)	85%	90%	94%	Efektif

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Yang Telah Diolah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja BPKK Aceh Singkil Tahun 2020-2022 menggunakan metode value for money yang terbagi menjadi tiga elemen utama yaitu:

Rasio Ekonomi

Pengukuran ekonomi bertujuan untuk mengetahui kinerja BPKK Aceh Singkil periode 2020-2022 dalam memperoleh sumber daya yang dibutuhkan agar menghindari pengeluaran tidak produktif dan sia-sia. Berdasarkan hasil analisis data pengukuran rasio ekonomi pada proyek BPKK Aceh Singkil, aspek perekonomian tercapai. Pada Tahun 2020 anggaran yang disajikan BPKK Aceh Singkil untuk belanja Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.883.919.511.827,45 dan realisasi sebesar Rp.860.472.547.502,00 yang dimana terjadi penghematan anggaran sebesar (Rp.23.446.964.325,45). Pada Tahun 2021 dengan anggaran belanja sebesar Rp.944.936.121.985,00 dan realisasi sebesar Rp.889.251.390.193,00 yang dimana terjadi penghematan anggaran sebesar (Rp.55.684.731.792,00), dan pada Tahun 2022 dengan anggaran belanja sebesar Rp.899.413.037.975,00

dan realisasi sebesar Rp.859.060.920.612,00 yang dimana terjadi penghematan sebesar (Rp.40.352.117.363,00). Terlihat dari jumlah anggaran yang tersedia tiap tahunnya tidak digunakan untuk melaksanakan seluruh proyek dengan nilai rata-rata rasio keekonomian sebesar 95,65% masuk dalam kategori ekonomis.

Rasio Efisiensi

Tujuan pengukuran efisiensi adalah untuk mengetahui kinerja BPKK Aceh Singkil dalam menerbitkan *output* produksi atas penggunaan *input* yang ada. Analisis data pengukuran efisiensi pada Tahun 2020-2022 sudah dapat dikategorikan cukup efisien. Pada Tahun 2020 program ini dapat di kategorikan efisien dan cukup efisien dengan indikator kinerja utama yaitu, tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi barang daerah dengan *input* sebesar 80% dan *output* sebesar 75% dengan rasio sebesar 94% dan peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis dikategorikan cukup efisien dengan indikator kinerja utama yaitu, tingkat efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/ Potensi PAD) dengan *input* sebesar 85,11% dan *output* sebesar 96% dengan rasio sebesar 87%. Pada Tahun 2021 program ini dapat dikategorikan efisien dan cukup efisien dengan indikator kinerja utama tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi barang daerah dengan *input* 85% dan *output* sebesar 82,75% dengan rasio sebesar 97% dan peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis dikategorikan cukup efisien dengan indikator kinerja utama yaitu, tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/ Potensi PAD) dengan *input* sebesar 97% dan *output* sebesar 84,23% dengan rasio sebesar 87%. Pada Tahun 2022 program ini dapat dikategorikan sangat efisien dikarenakan pada Tahun 2022 nilai *input* dan *output* nya sebesar 85% dengan rasio sebesar 100%, hal ini disebabkan sudah maksimalnya pemahaman SKPK menggunakan aplikasi barang milik daerah karena rutusnya dilakukan pelatihan/bimbingan untuk pengelola barang SKPK. Sedangkan pada indikator kinerja utama yaitu, tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/ Potensi PAD) dengan *input* sebesar 90% dan *output* sebesar 76,57% dengan rasio sebesar 85%, nilai rata-rata rasio efisien yaitu sebesar 92%.

Rasio Efektivitas

Tujuan dari pengukuran efektivitas ialah agar mengetahui tindakan BPKK Aceh Singkil untuk mencapai tujuan atau sasaran proyek tertentu. Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efektivitas kinerja BPKK Aceh Singkil Tahun 2020-2022 sudah dapat dikategorikan sangat efektif, dengan di buktikan bahwa kinerja BPKK Aceh singkil dalam melaksanakan program kerja telah searah dengan target yang telah ditentukan. Ini dapat ditemukan bahwa untuk Tahun 2020 program ini dapat di kategorikan sangat efektif dan efisien dengan indikator kinerja utama yaitu, tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi barang daerah dengan capaian target sebesar 93,75% dari 80% yang ditargetkan dengan rasio sebesar 117% dan peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis dikategorikan cukup efektif dengan indikator kinerja utama yaitu, tingkat efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/ Potensi PAD) dengan capaian target sebesar 88,65% dari 96% yang ditargetkan atau dengan hasil rasio sebesar 92%. Pada Tahun 2021 program ini dapat dikategorikan sangat efektif dan cukup efektif dengan indikator kinerja utama tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi barang daerah dengan capaian target sebesar 97,35% dari 85% yang ditargetkan atau dengan rasio sebesar 114% dan peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis dikategorikan cukup efektif dengan indikator kinerja utama yaitu, tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/ Potensi PAD) dengan capaian target sebesar 86,83% dari 97% yang ditargetkan atau dengan rasio sebesar 89%, dan pada Tahun 2022 program ini dapat dikategorikan sangat efektif dan efektif dengan indikator kinerja utama tingkat pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi barang daerah dengan capaian target sebesar 100% dari 85% yang ditargetkan atau dengan rasio sebesar 117%, dan peningkatan pendapatan daerah yang sinergitas dan realistis dikategorikan efektif dengan indikator kinerja utama yaitu, tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/ Potensi PAD) dengan capaian target sebesar 85,07% dari 90% yang ditargetkan atau dengan rasio sebesar 94%, nilai rata-rata rasio efektivitas 103%.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian ditemukan bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dinilai dengan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas dari periode 2020-2022 yang dimana rata-rata hasil rasio setiap elemen sudah tergolong sangat baik. Rasio ekonomi dari Tahun 2020-2022 sebesar 95,65% sudah dikategorikan ekonomis. Rasio efisiensi pada Tahun

2020-2022 sebesar 92% sudah dikategorikan efisien dan rasio efektivitas dari Tahun 2020-2022 sebesar 103% sudah dikategorikan sangat efektif. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil telah menjalankan konsep *value for money* yaitu mampu mengelola secara memadai setiap anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program kerja.

Saran

- Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
Dengan begitu instansi diharapkan agar memperhatikan penggunaan anggaran daerah yang tidak maksimal, dan akan bertaruh pada penggunaan anggaran daerah yang maksimal agar tidak kehilangan uang lebih dari tujuan yang telah ditetapkan.
- Bagi Peneliti Selanjutnya
Untuk peneliti akan datang yang mengangkat poin yang serupa diharapkan dapat mengukur kinerja bukan saja menggunakan konsep *value for money*, namun juga memakai rasio keuangan daerah agar hasil penelitian memperlihatkan hasil yang memuaskan.

REFERENSI

- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*.
- Arisaudi, Z. (2016), *Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Dengan Value For Money Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Palembang, Indonesia. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1334/>.
- Dewi I & Suartana W (2018), Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money (Studi di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat). Skripsi. Universitas Samawa.
- Fitriani. (2017). Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2018), *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-10.
- Irmawati, & Rinaldy, R. (2015), *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2015*. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1), 93-99.
- Mahmudi (2015), *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mahsun., dkk. (2013), *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mahsun (2015), *Pengukuran Kinerja Sektor Pubik*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPFE Anggota IKAPI. Yogyakarta.
- Mardiasmo (2018), *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Naim Nasril (2013), *Penerapan Konsep Value For Money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Rumah Sakit Umum Labuang Baji Kota Makassar*. Makassar.
- Putra, A. P. A., & Wirawati, N. G. P(2015), *Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. *E- jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(1), 252-268.
- Rumangit I et al (2022), Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.
- Sari CF, Nindy (2014), *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)*. *Jurnal Akuntansi UNESA* 3, no. 1.
- Sedarmayanti. (2017), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Undang-undang Nomor 32 tentang otonomi daerah. Jakarta.
- William Sanger G. (2023) *Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi.

- William Sanger G. (2023) Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi.
- Winia Aulia R. (2021), Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. *Skripsi*. Universitas Riau Pekanbaru.
- Zubair, E. & Koton, Y,P (2016), *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit CV Budi Utama.